

# PERSEPSI KELUARGA PENERIMA MANFAAT TENTANG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

## *BENEFICIARY FAMILY PERCEPTIONS ON THE POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN INDONESIA*

**Istiana Hermawati dan Endro Winarno**

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta  
E-mail: istiana1410@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2020; Direvisi: 18 Juli 2020; Disetujui: 10 Agustus 2020

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi Keluarga Penerima Manfaat tentang Program Pengentasan Kemiskinan beserta faktor pengaruhnya. Penelitian ini memadukan metode kuantitatif dengan kualitatif, melibatkan 770 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik Proporsional Multistage Random Sampling. Responden terdiri dari penyelenggara, pendamping, dan penerima program dari 77 desa di 11 provinsi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan FGD serta dianalisis menggunakan confirmatory factor analysis dan deskriptif interpretatif. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, berusia di atas 26 tahun, berstatus menikah, berpendidikan tamat SD, bekerja sebagai buruh dan petani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 905.430,-/bulan serta rata-rata pengeluaran sebesar Rp 1.110.372,-/bulan. Hasil analisis data kuantitatif menunjukkan sebagian besar KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan. Persepsi KPM didominasi pengaruh faktor obyek dibandingkan faktor pelaku dan faktor kondisi. Hasil analisis data kualitatif mengungkapkan bahwa pemahaman KPM hanya sebatas pada bantuan yang diterima, bukan tentang hakikat program. Penelitian ini merekomendasikan: 1) penguatan edukasi dan sosialisasi mengenai hakikat program bagi peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial, serta kesiapan KPM menghadapi graduasi; 2) penguatan koordinasi, baik di kalangan penyelenggara, pendamping, dan penerima program bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; dan 3) peningkatan kualitas dan kuantitas pendampingan sebagai bekal intervensi tentang program kepada KPM agar tujuan program dapat tercapai sesuai harapan.

**Kata kunci:** persepsi; keluarga penerima manfaat; program pengentasan kemiskinan.

### **Abstract**

*This study aims to describe the Beneficiary Family's perception of the Poverty Alleviation Program along with its influence factors. This research combines quantitative and qualitative methods, involving 770 respondents who were randomly selected using the Proportional Multistage Random Sampling technique. The respondents consisted of organizers, facilitators, and program recipients from 77 villages in 11 provinces. Data were collected through observation, interviews, and FGDs and analyzed using confirmatory factor analysis and interpretive descriptive. The majority of respondents were female, aged over 26 years, married, graduated from elementary school, worked as laborers and farmers with an average income of Rp. 905,430/month and an average expenditure of Rp. 1,110,372/month. The results of quantitative data analysis showed that most Beneficiary Family claimed to understand about the Poverty Alleviation Program. Beneficiary Family's perception is dominated by the influence of object factors compared to the perpetrators and condition factors. The results of the qualitative data analysis revealed that Beneficiary Family's understanding was only limited to the assistance received, not about the nature of the program. This study recommends: 1) strengthening education and outreach on the nature of programs for increasing capacity, independence and social functioning, and Beneficiary Family readiness to face graduation; 2) strengthening coordination, both among organizers, facilitators, and program recipients for the achievement of the effectiveness and efficiency of program implementation; and 3) increasing the quality and quantity of*

*assistance as a provision for intervention on the program to Beneficiary Family so that program objectives can be achieved as expected.*

**Keywords:** *perception; beneficiary family; poverty alleviation program.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah RI dari waktu ke waktu. Kemiskinan termasuk permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan melalui program terpadu secara berkelanjutan. Menurut Bappenas (2018) salah satu strategi khusus pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan pengintegrasian program penanganan kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (*life-cycle*), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat *single targeting framework* untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan dengan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai

Pemerintah RI melalui berbagai kementerian dan lembaga berkomitmen untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Undang-Undang RI No 13 Tahun 2011 mengamanatkan, bahwa Kementerian Sosial RI sebagai salah satu kementerian/ lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam upaya penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial setempat.

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan adalah dengan penambahan satu Direktorat Jenderal (Dirjen) baru di lingkungan Kemensos RI, yakni Dirjen Penanganan Fakir Miskin melalui Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial, setelah sebelumnya dibentuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-

Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap program bantuan sosial, pemerintah (khususnya Kemensos RI) meluncurkan berbagai program dan stimulus. Beberapa program yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia diantaranya program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan untuk keluarga miskin (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra)) dan program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Hal ini sejalan dengan statement Badan Pusat Statistika (2019) yang menyatakan, bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82%, turun 0,3% dibandingkan September 2017 sebesar 10,12%. BPS juga mencatat adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2018 yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Gini Perkotaan dan Perdesaan dari bulan Maret 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,389 pada bulan Maret 2018. Kemensos RI berperan menurunkan angka kemiskinan melalui beragam program Bansos dan subsidi. Sejumlah program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI menunjukkan kinerja positif, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) (Kompas.com,18

Juli 2018). Kondisi penduduk miskin Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik periode Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang atau 9,41%. Ini berarti telah terjadi penurunan angka kemiskinan lagi sebesar 0,41% dibanding periode Maret 2018 (Badan Pusat Statistik, 2019).

Sejalan dengan statement BPS, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan yang dilaksanakan Tim Peneliti Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Tahun 2018 juga menyimpulkan, bahwa tingkat ketercapaian pelaksanaan Program BPNT di 34 kota/kabupaten tergolong sangat efektif dengan nilai rerata sebesar 89,78%. Tingkat kemanfaatan program BPNT bagi KPM juga sangat tinggi dengan nilai rerata dari segi ekonomi sebesar 96,26% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program BPNT untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 30%, sedangkan kebutuhan telur (protein) tercukupi sebesar 4,46%. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program BPNT dengan tingkat kepuasan sebesar 80,12% (B2P3KS Yogyakarta, 2018).

Penelitian evaluasi tersebut juga mengungkapkan, bahwa tingkat ketercapaian pelaksanaan program Rastra di 16 kota/kabupaten relatif efektif dengan nilai rerata sebesar 84,42%. Tingkat kemanfaatan program Rastra bagi KPM juga sangat tinggi, dari segi ekonomi dengan nilai rerata sebesar 94,46% dan dari segi sosial sebesar 96,34%. Kontribusi program Rastra untuk pemenuhan kebutuhan beras KPM sebesar 34,00% dari total kebutuhan pangan setiap bulan. KPM merasa puas terhadap penyelenggaraan program Rastra dengan tingkat kepuasan sebesar 80,01%. (B2P3KS Yogyakarta, 2018).

Hasil penelitian ini mengindikasikan, bahwa secara keseluruhan Program Bansos Pangan, baik BPNT maupun Rastra sudah sangat efektif

seperti yang diharapkan, yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat manfaat. Data yang dikemukakan Badan Pusat Statistik terkait penurunan persentase penduduk miskin Indonesia, dan penurunan Indeks Gini dari waktu ke waktu, serta hasil evaluasi Tim Peneliti B2P3KS Yogyakarta di 50 kota/kabupaten menunjukkan keseriusan pemerintah cq Kementerian Sosial RI dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi keluarga penerima manfaat (KPM) tentang program pengentasan kemiskinan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM. Asumsi yang mendasari adalah, bahwa persepsi dapat bervariasi di antara individu (KPM) berdasarkan preferensi dan reaksi mereka ketika terpapar pada realitas yang sama (penerima program pengentasan kemiskinan).

Persepsi pada kehidupan seseorang merupakan representasi bermakna sebagai prediktor penting pada hasil kehidupan positif (Stavrova et al., 2020). Sementara itu, Walgito (2003) mendefinisikan persepsi sebagai sebuah proses pengorganisasian dan peninterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh setiap individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan aktivitas yang integrated dalam diri individu tersebut. Persepsi menurut Sugihartono, dkk (2007) merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya.

Hill, C.W.L. & McShane (2008) mendefinisikan persepsi sebagai proses menghadiri, menafsirkan, dan mengatur informasi. Zacks, (2020) menambahkan, bahwa representasi peristiwa dalam persepsi dan memori memiliki struktur internal yang kaya dan koneksi satu sama lain, dan keduanya

dijelaskan oleh pengetahuan yang dikumpulkan dari pengalaman sebelumnya. Dengan kata lain, persepsi seseorang dipengaruhi dan dibentuk oleh model mentalnya, yang merupakan produk dari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus dengan indera penglihatan, pendengaran dan penghayatan yang diterima oleh individu-individu yang nantinya akan memberikan makna atau pemahanan kepada lingkungannya. Pada persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Artinya, sebagian manusia ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi positif dan sebagian yang lain mempersepsikan sesuatu itu tidak baik atau persepsi negatif. Perbedaan persepsi itu akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Persepsi melibatkan tiga karakteristik, yaitu: (1) kesadaran akan objek yang dirasakan; (2) keyakinan akan keberadaan objek yang dirasakan; dan (3) penerimaan langsung dari objek yang dirasakan (Streit et al., 2007). Menurut Sobur (2003), persepsi memiliki tiga komponen utama, yaitu: (1) Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar; (2) Organisasi, yaitu proses pengaturan informasi agar mempunyai makna, dan (3) Interpretasi yang diidentikkan dengan reaksi.

Persepsi dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Mahmud & Anis Nik Azemi, (2019) *the developed performance management system* (PMS faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terdiri dari: (1) pengetahuan dan kemampuan, dan (2) cara menilai sesuatu. Sedang menurut Robbins (2003) faktor yang

mempengaruhi persepsi antara lain: pelaku persepsi, objek atau target yang dipersepsikan dan kondisi. Dalam konteks penelitian ini, konsep yang digunakan terkait faktor yang mempengaruhi persepsi mengacu pada konsep Robbins. Toha (2007) mengemukakan, bahwa proses persepsi sosial hanya akan melibatkan orang yang melihat atau menilai (*preciever*) dan orang yang dinilai atau dilihat (*precieved*). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat dimaknai, bahwa persepsi KPM merupakan pemahaman dan sikap KPM terhadap obyek tertentu, dalam hal ini kebijakan pemerintah cq Kementerian Sosial RI melalui program pengentasan kemiskinan yang melibatkan mereka sebagai sasaran program (penerima manfaat). Program pengentasan kemiskinan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial pangan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra). Persepsi KPM tersebut sedikit atau banyak akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam merespon kebijakan pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian survey bersifat *ex post facto* yang dilakukan dengan memadukan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau *mixed methods*. Menurut (Creswell, 2014) *mixed methods* merupakan pendekatan dalam penelitian dengan cara mengkombinasikan atau mengasosiasikan teknik kualitatif dan kuantitatif. Dalam konteks penelitian ini, metode campuran yang digunakan adalah sekuensial eksplanatori. Artinya, dalam penelitian ini data kuantitatif dikumpulkan dan

dianalisis terlebih dahulu sesuai dengan desain yang ditentukan (*survey*), kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data kualitatif melalui *in depth interview* terhadap sejumlah informan. Pada Interpretasi data, peneliti menjelaskan bahwa analisis data kualitatif menerangkan (*to explain*) apa yang didapatkan dari analisis kuantitatif. Pertimbangan digunakannya kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini agar ditemukan hasil penelitian yang lebih komprehensif, dibanding hanya menggunakan salah satu pendekatan saja.

Penelitian ini dilaksanakan di 11 provinsi, 70 kabupaten, 5 kota, 77 kecamatan, dan 77 desa/kelurahan penerima Program PKH dan Bansos Pangan di Indonesia. Dalam pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2019, dilibatkan 17 orang peneliti dan 5 orang pembantu peneliti dari B2P3KS, serta

sejumlah peneliti independen dari Lembaga Survei Populi (8 orang Supervisor Provinsi dan 77 orang Enumerator Lokal). Lokasi ditentukan secara acak dengan mempertimbangkan pembagian tiga wilayah kerja sesuai kebijakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta keberadaan tiga program (PKH, Rastra, dan BPNT) di wilayah tersebut.

Responden penelitian ini terdiri dari: 1) KPM PKH-BPNT, KPM PKH-Rastra, KPM BPNT, dan KPM Rastra, 2) Penyelenggara program, serta 3) Pendamping PKH, BPNT, dan Rastra. Atas dasar pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, maka setiap desa/kelurahan diambil sampel sebanyak 10 orang atau 770 orang dari 77 desa/kelurahan. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional multistage random sampling dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perincian Jumlah Sampel Penelitian Menurut Provinsi dan Jenis Program.

| No            | Provinsi            | KPM PKH-BPNT     |                   | KPM BPNT         |                   | KPM PKH-RASTRA |                   | KPM RASTRA       |                   | Total Respon-<br>den (KK) | Desa      |
|---------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
|               |                     | Populasi         | Sampel (adjusted) | Populasi         | Sampel (adjusted) | Populasi       | Sampel (adjusted) | Populasi         | Sampel (adjusted) |                           |           |
| 1             | Banten              | 108.589          | 10                | 95.535           | 10                | 80.878         | 10                | 176.832          | 20                | 50                        | 5         |
| 2             | Jawa Tengah         | 1.269.192        | 120               | 1.234.794        | 120               | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 240                       | 24        |
| 3             | DI. Yogyakarta      | 159.704          | 20                | 129.312          | 10                | 0              | 0                 | 0                | 0                 | 30                        | 3         |
| 4             | Jawa Timur          | 1.100.023        | 110               | 1.320.238        | 120               | 138.075        | 10                | 211.924          | 20                | 260                       | 26        |
| 5             | Kalimantan Barat    | 13.249           | 0                 | 10.223           | 0                 | 101.767        | 10                | 96.792           | 10                | 20                        | 2         |
| 6             | Kalimantan Selatan  | 41.389           | 0                 | 24.370           | 0                 | 41.995         | 0                 | 44.573           | 10                | 10                        | 1         |
| 7             | Sulawesi Tengah     | 9.001            | 0                 | 3.592            | 0                 | 97.037         | 10                | 92.228           | 10                | 20                        | 2         |
| 8             | Sulawesi Selatan    | 135.554          | 10                | 86.637           | 10                | 112.531        | 10                | 101.231          | 10                | 40                        | 4         |
| 9             | Sulawesi Tenggara   | 12.236           | 0                 | 4.481            | 0                 | 76.568         | 10                | 61.970           | 10                | 20                        | 2         |
| 10            | Nusa Tenggara Barat | 120.805          | 10                | 81.361           | 10                | 116.071        | 10                | 154.910          | 10                | 40                        | 4         |
| 11            | Nusa Tenggara Timur | 8.797            | 0                 | 3.452            | 0                 | 225.554        | 20                | 213.153          | 20                | 40                        | 4         |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>2.978.539</b> | <b>280</b>        | <b>2.993.995</b> | <b>280</b>        | <b>990.476</b> | <b>90</b>         | <b>1.153.613</b> | <b>120</b>        | <b>770</b>                | <b>77</b> |

Sumber: Kerangka Sampel Penelitian, 2019.



Data kuantitatif terkait persepsi KPM dikembangkan berdasar 2 indikator yaitu persepsi (pengetahuan dan pemahaman) KPM terhadap: (1) program pengentasan kemiskinan (PKH dan BPNT), dan (2) kinerja program pengentasan kemiskinan (PKH dan BPNT). Instrumen dibuat dalam bentuk skala likert dengan empat opsi jawaban, yaitu: sangat paham (skor 4), paham (skor 3), belum/tidak paham (skor 2) dan sangat tidak paham (skor 1). Tingkat persepsi KPM merupakan akumulasi dari tingkat kepaahaman KPM terhadap program dan kinerja program pengentasan kemiskinan yang diperoleh dari skor total jawaban responden (KPM). Sedangkan pendalaman tentang persepsi KPM terhadap program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan teknik *in depth interview*. Untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi KPM dikembangkan instrumen dengan menjabarkan faktor: (1) pelaku, (2) Obyek yang dipersepsikan dan (3) kondisi ke dalam sejumlah subfaktor/indikator. Pelaku persepsi diukur dari indikator umur, pendidikan dan penghasilan KPM; obyek yang dipersepsikan diukur dari indikator jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program dan kualitas program; kondisi diukur dari indikator lama KPM menerima bantuan. Jawaban responden menjadi dasar dalam melakukan pengujian dengan menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) sehingga dapat diketahui loading factor dari masing-masing faktor persepsi yang diukur. CFA menurut (Joreskog & Sorbom, 1993) digunakan untuk menguji unidimensional, validitas dan reliabilitas model pengukuran konstruk yang tidak dapat diukur langsung. Model ini menurut Ferdinand (2002) disebut model deskriptif atau *confirmatory factor model* yang menunjukkan operasionalisasi variabel atau konstruk penelitian menjadi indikator-indikator terukur

yang dirumuskan dalam bentuk persamaan dan atau diagram jalur tertentu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi (*check list*), kuesioner, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Peserta FGD pada masing-masing lokasi sebanyak 15 orang terdiri dari: 1) Tim Pelaksana PKH Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang; 2) Tim Koordinasi BPNT Kabupaten/Kota sebanyak 2 orang; 3) Korkot/Korkab PKH sebanyak 1 orang; 4) Korteks BPNT sebanyak 1 orang; 5) Pendamping PKH sebanyak 2 orang; 6) TKSK sebanyak 2 orang; 7) KPM PKH sebanyak 2 orang; 8) KPM BPNT/Rastra sebanyak 2 orang; dan 9) Narasumber/Moderator sebanyak 1 orang.

Data penelitian yang bersifat kuantitatif digunakan untuk menggambarkan sasaran penelitian dan persepsi KPM. Data kuantitatif diolah menggunakan statistik deskriptif. Untuk mengukur keterkaitan antar variabel/ komponen faktor yang mempengaruhi persepsi KPM menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan bantuan Program Lisrel 8.54 yang dikuatkan dengan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM). Data yang bersifat kualitatif untuk mengungkap lebih dalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dianalisis secara deskriptif mengacu pada model analisis versi (Milles & Huberman, 1994)

Limitasi penelitian ini antara lain: 1) keterbatasan waktu, 2) tidak adanya kesempatan untuk melakukan *coaching* kepada enumerator lapangan, sehingga pemahaman enumerator lapangan terhadap instrumen tidak sama, dan 3) sampel telah ditetapkan pusat berdasarkan kerangka sampling yang mengacu pada data Pusdatin, sehingga mengalami kesulitan dalam penggantian sampel terpilih ketika terjadi permasalahan terkait dengan keberadaan sampel di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Responden Penelitian

Penelitian ini melibatkan 770 orang responden KPM Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI. Rincian jumlah sampel penelitian tergambar pada Tabel 1.

Secara deskriptif dapat digambarkan, bahwa mayoritas responden penelitian ini berjenis kelamin Perempuan, yakni sebanyak 721 orang (93,60%), selebihnya sebanyak 49 orang (6,40%) berjenis kelamin Laki-laki. Sebagian besar responden berada pada rentang usia 26 tahun ke atas (97,8%); berstatus menikah (82,70%); berpendidikan tamat SD ke bawah (74,80%); dengan rata-rata pendapatan keluarga Rp 905.430,- per bulan serta rata-rata pengeluaran keluarga Rp 1.110.372,- per bulan. Sebagian besar responden (58,72%) terpaksa menekuni pekerjaan sebagai buruh dan petani, bahkan 32,33% responden lainnya tidak dapat bekerja, yang juga disebabkan faktor usia. Berdasarkan kenyataan ini sangatlah wajar apabila pendapatan dan pengeluaran keluarga dari hampir seluruh responden penelitian ini tidak lebih dari Rp 1.500.000,- per bulan.

Kondisi kehidupan sebagian besar responden (58,2%) dengan jumlah anak sebanyak 2-3 orang dirasakan berat, tanpa adanya intervensi dari Pemerintah (Kemensos RI), berupa Program Pengentasan Kemiskinan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra). Berkenaan dengan hal tersebut, responden sangat merasa terbantu dengan menjadi KPM program pengentasan kemiskinan ini. Deskripsi responden berdasar program yang diikuti dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jumlah Responden Penelitian Menurut Keikutsertaan dalam Program.

| No.   | Kategori Program | Frekuensi | Persentase |
|-------|------------------|-----------|------------|
| 1     | PKH-BPNT         | 280       | 36,36      |
| 2     | PKH-Rastra       | 90        | 11,69      |
| 3     | BPNT             | 280       | 36,36      |
| 4     | Rastra           | 120       | 15,59      |
| Total |                  | 770       | 100        |

*Sumber: Hasil Penelitian, 2019.*

Data dalam Tabel 2 menunjukkan, bahwa mayoritas responden penelitian adalah KPM PKH-BPNT dan KPM BPNT dengan jumlah sama, yakni masing-masing sebanyak 280 KPM (36,6%), sedang jumlah KPM-Rastra sebanyak 120 KPM (15,59%), dan jumlah terkecil adalah KPM PKH-Rastra sebanyak 90 KPM (11,69%). Jumlah KPM-Rastra relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah KPM PKH dan BPNT, karena adanya kebijakan Kementerian Sosial RI untuk mengalihkan mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai.

### Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Data pada Gambar 1 menunjukkan, bahwa KPM PKH-BPNT yang memahami program sebanyak 78%-80%, KPM PKH-Rastra sebanyak 60%-75%, KPM BPNT sebanyak 70%, dan KPM Bansos-Rastra sebanyak 60%. Sementara KPM PKH-BPNT yang belum memahami program sebanyak 2%-14%, KPM PKH-Rastra sebanyak 15%-16%, KPM BPNT sebanyak 20%, dan KPM Bansos-Rastra sebanyak 27%. Hal ini menunjukkan, bahwa secara umum KPM yang telah paham lebih banyak daripada KPM yang belum paham tentang program pengentasan kemiskinan yang diikutinya. Jumlah KPM paling banyak yang telah memahami program adalah KPM PKH-BPNT (78%-80%), sedang jumlah KPM

terbanyak yang belum memahami program adalah KPM Bansos-Rastra (27%).

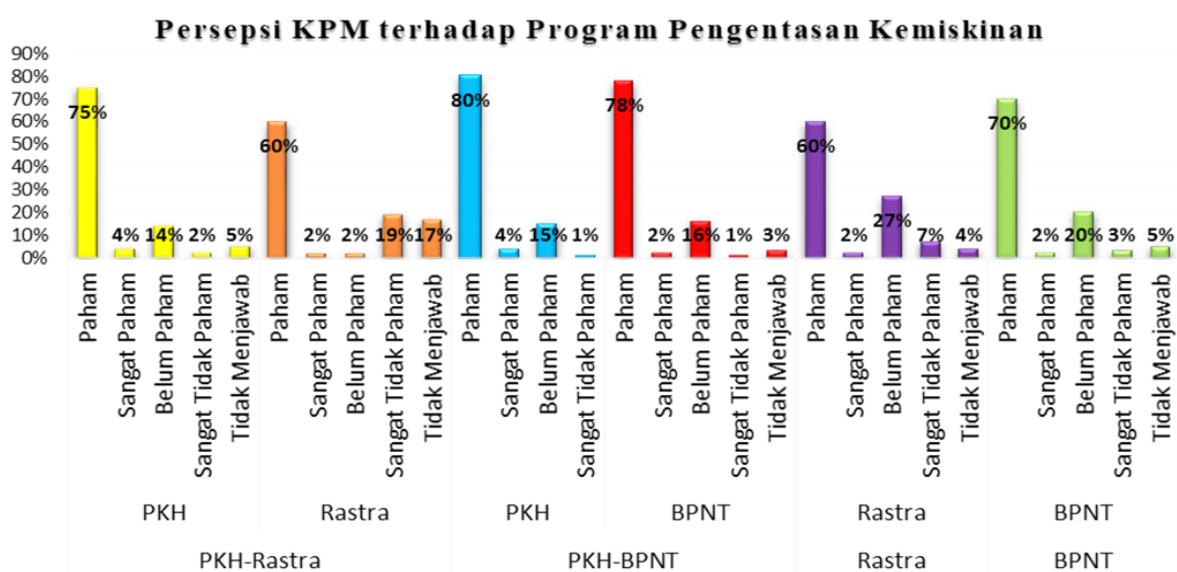
Pada sisi lain, jumlah KPM terkecil yang telah memahami program adalah KPM-Bansos Rastra (60%), sedang jumlah KPM terkecil yang belum memahami program adalah KPM-PKH BPNT (2%-14%). Hal ini menunjukkan, bahwa KPM PKH-BPNT dengan KPM Bansos-Rastra berada pada dua kutub tingkat pemahaman yang berbeda tentang program pengentasan kemiskinan yang diikutinya. Sebagian lokasi penelitian sudah tidak lagi menyelenggarakan Program Pengentasan Kemiskinan berupa Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) karena sudah beralih pada mekanisme penyaluran non tunai berupa bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

KPM PKH memiliki pemahaman tentang program yang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan KPM program lainnya, karena program ini sudah berjalan relatif lama, yakni sejak 2007 dengan mekanisme program yang sangat jelas, serta didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang relatif sangat memadai. Sementara KPM Bansos-Rastra

memiliki pemahaman yang relatif lebih rendah apabila dibanding KPM program lainnya, karena program ini merupakan kelanjutan dari program Raskin yang menyisakan pengalaman kurang baik bagi KPM, terutama terkait dengan mekanisme penyaluran dan kualitas beras.

### Faktor yang Mempengaruhi Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Mengacu pada pemikiran Robbins (2003: 160-163), terkait tiga faktor yang mempengaruhi persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan, maka dapat disajikan hasil analisis data seperti yang tertuang dalam Tabel 3. Data dalam Tabel 3 mengungkap, bahwa tiga faktor beserta sejumlah subfaktor yang berpotensi mempengaruhi persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI adalah: 1) Faktor pelaku persepsi (usia, pendidikan, dan penghasilan); 2) Faktor obyek yang dipersepsikan (jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program, dan kualitas layanan pendampingan); serta 3) Faktor kondisi (lama menerima bantuan).



**Gambar 1.** Persepsi KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan



Berdasarkan hasil analisis faktor konfirmatori dapat diketahui, bahwa seluruh komponen faktor tersebut memberikan sumbangan pengaruh yang signifikan, baik terhadap persepsi KPM PKH, KPM BPNT, maupun KPM Bansos Rastra, dengan besaran *loading factor*: 1) faktor pelaku persepsi sebesar 0,81; 2) faktor obyek yang dipersepsikan sebesar 0,91, dan 3) faktor kondisi sebesar 0,86. Sedangkan nilai *t* dari: 1) faktor pelaku sebesar 26,25, 2) faktor Obyek yang dipersepsikan sebesar 31,14, dan 3) faktor kondisi sebesar 28,57. Hasil analisis ini menunjukkan, bahwa faktor obyek yang dipersepsikan memiliki besaran *loading factor* (0,91) dan nilai *t* (31,14) tertinggi dibandingkan dengan faktor lainnya. Obyek yang dipersepsikan antara lain berupa jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program, dan kualitas layanan pendampingan. Faktor ini dominan mempengaruhi arah persepsi KPM tentang program. Fakta ini mengungkap, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI didominasi oleh obyek yang dipersepsikan, yakni bantuan yang diterima, mekanisme penyaluran bantuan,

informasi terkait bantuan, dan kualitas pendampingan yang diterima.

Persepsi KPM tentang program juga tercermin dari hasil wawancara terhadap responden di sejumlah lokasi penelitian, antara lain di Kabupaten Serang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bantul, Kabupaten Malang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Banjar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Mataram, dan Kabupaten Kupang. Sebagian besar KPM di sejumlah lokasi tersebut tidak memahami hakikat program pengentasan kemiskinan yang memposisikan mereka sebagai KPM, kecuali hanya sebatas pada bentuk dan nilai bantuan yang telah mereka terima.

KPM PKH memahami program sebagai bantuan pembiayaan untuk meringankan beban pemenuhan kebutuhan keluarga di bidang pendidikan dan kesehatan. KPM BPNT memahami program sebagai bantuan paketan berupa 7 Kg beras dan 1 Kg telur, sedang KPM Bansos-Rastra memahami program sebagai bantuan beras sebanyak 10 Kg. Bahkan sejumlah KPM tidak mengetahui kepanjangan dari PKH dan BPNT. Mereka juga tidak mengetahui perbedaan antara Raskin, Rastra, dengan BPNT. Ketidakpahaman tentang hakikat

**Tabel 3** Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi KPM Tentang Program Pengentasan Kemiskinan dengan Nilai Sumbangannya

| Faktor                                                                                    | Sub Faktor                                  | Nilai |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| <b>Pelaku persepsi</b><br><i>Loading factor</i> : 0,81<br>Nilai <i>t</i> : 26,25          | a. Usia                                     | 0,90  |
|                                                                                           | b. Pendidikan                               | 0,85  |
|                                                                                           | c. Penghasilan                              | 0,80  |
| <b>Obyek yang dipersepsikan</b><br><i>Loading factor</i> : 0,91<br>Nilai <i>t</i> : 31,14 | a. Jenis dan jumlah bantuan yang diterima   | 0,67  |
|                                                                                           | b. Mekanisme pelaksanaan program            | 0,94  |
|                                                                                           | c. Informasi yang diperoleh terkait program | 0,88  |
|                                                                                           | d. Kualitas layanan pendampingan            | 0,38  |
| <b>Kondisi</b><br><i>Loading factor</i> : 0,86<br>Nilai <i>t</i> : 28,57                  | Lama menerima bantuan                       | 0,86  |

**Sumber:** : Hasil Analisis Faktor Konfirmatori Data Primer Penelitian, 2019.

program pengentasan kemiskinan ini juga dijumpai pada kalangan Tim Koordinasi (*stakeholders*) dan Pendamping Program di sejumlah kabupaten/kota. Sebagian besar KPM juga tidak mengetahui secara pasti pihak penyelenggara program tersebut. Pihak-pihak yang seringkali disebutkan sebagai pemberi bantuan tersebut, antara lain Presiden Jokowi, Dinas Sosial, Pendamping, bahkan Pemilik *e-warong* atau Agen Bank.

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya informasi yang mereka dapatkan terkait hakikat PKH dan atau Program Bansos Pangan, baik BPNT maupun Rastha. Kebanyakan dari mereka baru sekali menerima penjelasan tentang program selama menjadi KPM (di awal program), bahkan tidak sedikit diantara mereka yang belum sekalipun menerima penjelasan tentang program selama menjadi KPM.

Informasi yang KPM dapatkan hanya sebatas pada bagaimana cara menerima bantuan melalui mesin ATM atau EDC yang masih sangat asing bagi mereka. Penjelasan itu sangat sulit mereka pahami, terbukti kebanyakan KPM tidak pernah mampu menggunakan sendiri kartu yang telah mereka miliki untuk mengakses bantuan, bahkan sebagian besar kartu tidak mereka simpan sendiri. Banyak kartu atas nama KPM yang dititipkan pada pendamping atau *e-warong*, bahkan PIN atau password mereka untuk mendapatkan bantuan tersebut juga mereka berikan kepada pendamping atau *e-warong*. Menurut mereka, hal itu untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan bantuan. Fakta ini menunjukkan,

bahwa kalangan KPM masih gagap dengan kebiasaan dalam dunia perbankan, kendati telah berulang kali diberi penjelasan teknis oleh petugas.

Kualitas layanan pendampingan juga merupakan sub faktor pengaruh terhadap persepsi atau pemahaman KPM tentang program. Secara umum responden merespon positif terhadap pendampingan yang diberikan petugas.

*"Permintaan saya untuk diantar mengurus surat keperluan bantuan selalu dilayani.....". "Setiap kali kami menemui masalah, pendamping selalu membantu...". "Pendamping pasti mau mendampingi saya, ketika saya membutuhkan....". "Pendamping selalu mengabari dengan cepat tentang pencairan bantuan ini, sehingga kami dapat segera mendapatkan beras dan telur untuk di makan". "Saya sering diberi penjelasan tentang bantuan yang saya terima, seperti kapan pencairan, dan tempat pencairan bantuan...". "Saya diberi penjelasan oleh pendamping, sebelum mendapatkan bantuan, bahwa akan dapat bantuan berupa beras dan telur setiap bulannya..."*

Pendamping juga dinilai peduli terhadap kondisi keterbatasan yang melekat pada kalangan KPM.

*"saya mengucapkan terimakasih kepada pendamping, karena bantuan saya selalu diantarkan ke rumah setiap bulannya, rumah saya jauh dan naik turun bukit.....". "Pendamping dengan jelas mengemukakan persyaratan kepada saya untuk mendapatkan bantuan ini, seperti keluarga miskin, keluarga tidak mampu atau keluarga yang serba kekurangan...". "Saya tahu sebelum mendapatkan bantuan ini, pendamping mendata saya dulu..."*

*melihat pendamping orangnya pinter... dan paham sekali apabila menjelaskan tentang bantuan ini...". "Pendamping sangat gesit apabila dimintai bantuan oleh warga miskin disini...". "Pak Jarwanto orangnya lucu dan ramah sering bercanda dengan kami semua... dia banyak membantu kami....". "Setiap saya minta bantuan apapun kepada pendamping dan pasti dibantunya....". "Saya bangga pendamping kami orangnya baik sekali... dan ringan tangan kepada kita semua yang membutuhkan...". "Pendamping kami tidak pilih kasih dalam memberi pelayanan".*

Berbagai ungkapan ini menggaris bawahi, bahwa persepsi, ketertarikan, antusiasme, atau pemahaman KPM sangat kuat terhadap obyek yang dipersepsikan, yakni kualitas layanan pendampingan, informasi terkait program, jenis dan jumlah bantuan sosial, serta mekanisme pelaksanaan program.

Mekanisme pelaksanaan program memberi sumbangan terkecil dalam membangun persepsi responden. Kenyataan menunjukkan, bahwa persepsi atau pemahaman KPM tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI lebih terfokus pada bantuan, baik berupa sejumlah uang untuk KPM PKH maupun berupa beras dan atau telur untuk KPM BPNT atau KPM Bansos Rastra, yang secara finansial memang sangat menguntungkan mereka. KPM kurang memahami mekanisme bantuan. Mereka cenderung mempercayakan pada Pendamping Program untuk mengakses bantuan. KPM sangat antusias terhadap keberadaan, bahkan keberlanjutan program. KPM sangat bersyukur dapat memperoleh bantuan tersebut, kendati mereka tidak paham maksud yang terkandung dalam bantuan tersebut, yakni pengentasan kemiskinan, yang menempatkan bantuan

sebagai salah satu sarana untuk memandirikan dan bukan untuk membuat KPM semakin tergantung.

KPM hampir tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai hakikat program, kecuali tata-caramenggunakanfasilitasperbankan(ATM dan EDC) untuk menerima bantuan tersebut. Hal ini berbeda dengan KPM di Kabupaten Sigi yang umumnya telah paham bahwa PKH, BPNT, dan Bansos Rastra adalah Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI dan disalurkan melalui pengawasan dinas sosial setempat. Pemahaman ini dikarenakan telah dilakukannya beberapa kali sosialisasi program secara terstruktur mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga KPM. Sosialisasi ini diperkuat dengan pertemuan rutin antara pendamping dengan KPM. Pemerintah kabupaten turut memperkuat program dengan dana sharing dari APBD. Sosialisasi program BPNT telah dilaksanakan di semua wilayah target. Melalui sosialisasi KPM mengetahui substansi program, bentuk dan jumlah bantuan, serta mekanisme penyalurannya. KPM juga telah mengetahui bahwa BPNT ini akan disalurkan melalui e-Warong atau agen yang telah ditunjuk melalui transaksi elektronik.

## KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 1) Mayoritas responden penelitian ini berjenis kelamin perempuan, berusia di atas 26 tahun, berstatus menikah, berpendidikan tamat SD, menekuni pekerjaan sebagai buruh dan petani, dengan rata-rata pendapatan keluarga Rp 905.430,- per bulan serta rata-rata pengeluaran keluarga Rp 1.110.372,- per bulan. 2) Terkait pemahaman terhadap program, mayoritas KPM mengaku paham tentang Program Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian

Sosial RI yang memposisikan mereka sebagai KPM. 3) Persepsi KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI didominasi oleh pengaruh faktor obyek yang dipersepsikan, dibandingkan dengan faktor pelaku dan faktor kondisi. Fakta ini menunjukkan, bahwa pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan hanya sebatas pada bantuan yang akan diterimanya, bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan.

Fakta ini menunjukkan, bahwa pemahaman KPM tentang Program Penanganan Kemiskinan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI hanya sebatas pada bantuan yang telah dan diharapkan akan terus diterimanya; bukan pemahaman tentang hakikat program secara keseluruhan. Sementara bantuan sosial pada dasarnya adalah sekadar strategi untuk memutus Lingkaran Setan Kemiskinan (*Visious Circle of Poverty*) dan tidak diberikan secara terus-menerus. Bantuan diberikan agar KPM mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial mereka agar segera terbebas dari "rantai kemiskinan" yang selama ini senantiasa membelenggu mereka. Hal ini tentu saja harus disikapi secara bijaksana.

## SARAN

Berdasar temuan penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 1) Keterbatasan pemahaman KPM tentang hakikat program penanganan kemiskinan secara menyeluruh dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian efektivitas program. Hal ini cenderung dipengaruhi minimnya informasi yang diperoleh KPM terkait program. Atas dasar hal itu penelitian ini merekomendasikan upaya penguatan kegiatan edukasi dan sosialisasi

mengenai hakikat program, tujuan, manfaat, prinsip utama, dan mekanisme pelaksanaan program bagi terciptanya peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial KPM serta kesiapan mereka menghadapi graduasi, baik bagi KPM maupun bagi tim pengendali, tim koordinasi (*stakeholders*), kepala desa/lurah, penyalur (Himbara, Bulog, e-warong dan agen), serta pendamping program. 2) Penguatan koordinasi, baik di kalangan Tim Pengendali, Tim Koordinasi, Kepala Desa/Lurah, Penyalur (Himbara, Bulog, *e-Warong*, dan Agen), Pendamping Program, maupun Keluarga Penerima Manfaat bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendamping sebagai bekal pemberian intervensi dan pemahaman tentang program kepada KPM sehingga tujuan program dapat tercapai sesuai dengan harapan. 4) Penyuluhan dan Bimbingan Sosial selayaknya menjadi ikon Kementerian Sosial RI dan menjadi kegiatan terpenting dalam penyelenggaraan setiap program sebagai tindak lanjut dari kebijakan SDM Unggul Indonesia Maju.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sejumlah satuan kerja, lembaga publik, keluarga, dan individu di lokasi penelitian yang bertugas menyelenggarakan dan menerima manfaat Program Pengentasan Kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan, baik Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera (Bansos Pangan Rastra) serta berbagai pihak yang telah menyediakan waktu, memberikan informasi, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- B2P3KS, T. P. (2018). *Hasil Evaluasi Efektivitas Program Bansos Rastra dan BPNT pada 50 Kota/Kabupaten Di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistika. (2019). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Bappenas. (2018). *Integrasi Program-program Kemiskinan dapat Menurunkan Dua Persen Tingkat Kemiskinan*. <https://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/integrasi-program-program-kemiskinan-dapat-menurunkan-dua-persen-tingkat-kemiskinan/> diunduh tanggal 5 Maret 2020, jam 10:42.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Ferdinand, A. (2002). *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen, Edisi ketiga*. Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Hill, C. W. L., & McShane, S. L. (2008). *Principles of Management*. McGraw-Hill International Edition.
- Joreskog, K., & Sorbom, D. (1993). LISREL 8 user's reference guide. Scientific Software International.
- Kompas.com. (2018). Peran Kementerian Sosial pada Capaian Penurunan Kemiskinan.
- Mahmud, F., & Anis Nik Azemi, N. (2019). Factors Influencing Employee Perception on Performance Management System. KnE Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5072>
- Milles, M., & Huberman, A.. (1994). *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook*. SAGE Publication.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 tentang Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin, (2013).
- Peraturan Presiden RI Nomor 46 tentang Kementerian Sosial, (2015).
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Index Kelompok Gramedia.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Pustaka Setia.
- Stavrova, O., Pronk, T., & Kokkoris, M. D. (2020). Finding meaning in self-control: The effect of self-control on the perception of meaning in life. *Self and Identity*, 19(2), 201–218. <https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1558107>
- Streit, M., Shockley, K., & Riley, M. A. (2007). Rotational inertia and multimodal heaviness perception. *Psychonomic Bulletin and Review*. <https://doi.org/10.3758/BF03194135>
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. UNY Pers.
- Toha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Walgito, B. (2003). Pengantar Psikologi Umum. Andi Offset.

Zacks, J. M. (2020). Event Perception and Memory. *Annual Review of Psychology*, 71(1), 165–191. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-051101>.